



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 April 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NUNUK SURYANI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **263350**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.670.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 49 m2/40 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 38 m2/30 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/200 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah Seluas 226 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 388 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
6. Tanah Seluas 422 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 373.000.000**

1. MOBIL, OPEL BLAZER JEEP Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU GRAN MAX MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 83.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.454.092.514
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.580.092.514
III. HUTANG	Rp.	2.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.577.592.514

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.